

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

Sartono Kartodirdjo
Marwati Djoened Poesponegoro
Nugroho Notosusanto

IV

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1975

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

Sejarah Nasional Indonesia

- Jilid I Jaman Prasejarah di Indonesia
- Jilid II Jaman Kuno (1 M + 1500 M).
- Jilid III Jaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia (\pm 1500 \pm 1800)
- Jilid IV Abad Kesembilanbelas (\pm 1800 - 1900)
- Jilid V Jaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (\pm 1900 - 1942).
- Jilid VI Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia (\pm 1942 - 1970).

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

IV

INDONESIA
DALAM ABAD 18 DAN 19

Editor :

F.A. Sutjipto

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1975

TEAM REDAKSI

Ketua : F.A. Sutjipto
Anggota : Djokosuryo
Sartono Kartodirdjo
The Kian Wie

KATA PENGANTAR

Sejarah Indonesia pada abad ke XVIII dan XIX ditandai oleh hubungan yang makin intensif antara kekuasaan-kekuasaan tradisional dan kekuasaan asing, dalam hal ini kekuasaan Belanda. Dalam hubungan ini nampak pula, bahwa intensitas hubungan tersebut di tiap-tiap daerah di Indonesia tidak sama. Hal ini terutama disebabkan karena proses historis masuknya pengaruh dan meluasnya kekuasaan Belanda di daerah satu dan lainnya tidak paralel. Dapat pula dikatakan, bahwa tiap-tiap daerah mempunyai sejarahnya sendiri, yang kadang-kadang tidak nampak sama sekali hubungannya dengan daerah lain. Namun dengan menggunakan datangnya pengaruh kekuasaan Barat sebagai aliran pokok (*mainstream*), dapat dicari hubungan yang terdapat antara daerah-daerah tersebut.

Kekuasaan-kekuasaan tradisional (kerajaan-kerajaan) di Indonesia mempunyai sistim politik dan susunan masyarakat yang berbeda. Sifat kerajaan agraria agak berbeda dengan kerajaan pantai. Ekspansi kekuasaan Belanda di kerajaan pantai nampak agak berbeda dengan di kerajaan pedalaman, meskipun disana-sini terdapat juga persamaan, seperti taktik Belanda dalam mengadakan campurtangan urusan intern kerajaan. Di daerah Jawa sistim eksploitasi produksi agraris oleh Belanda nampak lebih kompleks dari pada di daerah lain.

Kesamaan yang nampak menonjol dari pelbagai daerah kerajaan di Indonesia ialah, bahwa usaha ekspansi kekuasaan Belanda sebagian besar menimbulkan reaksi baik dari penguasa setempat atau pun sekelompok elite dalam kerajaan, seperti para bangsawan atau orang-orang dari golongan agama. Hal ini menunjukkan, bahwa penguasa-penguasa dan rakyat kerajaan berusaha untuk tetap dapat hidup (*survive*), meskipun harus menghadapi tekanan-tekanan dari kekuasaan Belanda yang adakalanya cukup kuat.

Pokok-pokok fikiran tersebut diharapkan dapat tertuang dalam bab-bab pada penerbitan ini. Sistim politik kerajaan

tradisionil yang menyangkut aspek-aspek seperti: kedudukan dan kekuasaan raja, susunan birokrasi, sumber penghasilan kerajaan dan susunan masyarakatnya, diuraikan dengan maksud untuk memberi gambaran tentang struktur kerajaan-kerajaan tersebut. Uraian tentang perkembangan politik kolonial Belanda beserta perubahan-perubahan yang terjadi dikaitkan dengan fikiran-fikiran yang mendasari politik tersebut, seperti faham konservatif, liberal, ethis dan seterusnya.

Pengetrapan politik kolonial tersebut di dalam masyarakat Indonesia menyangkut pelbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, ketatanegaraan, birokrasi dan lainnya.

Mengingat bahwa tujuan yang paling utama dari politik kolonial Belanda adalah keuntungan ekonomis, maka dalam buku ini disediakan bab khusus untuk menguraikan perkembangan ekonomi Indonesia dalam abad ke XIX. Perkembangan ekonomi ini menyangkut macam-macam sistim yang digunakan oleh pemerintah asing, ialah Inggris dan Belanda, untuk menguasai faktor-faktor produksi agraris, seperti sistim Sewa Tanah (*Land-rente*) dan Sistim Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*). Akan diuraikan pula perkembangannya setelah Belanda menganut politik kolonial liberal.

Adalah jelas pula, bahwa penguasa-penguasa tradisionil dan rakyat mereka tidak selalu menerima perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, lebih-lebih segi-segi yang memberatkannya, seperti pajak, pengerahan tenaga kerja, pemakaian tanah rakyat dan sebagainya. Di daerah-daerah lain yang merupakan kerajaan pantai, seperti Banjar, Aceh dan Makasar, penguasaan urusan perdagangan bandar lebih diutamakan oleh Belanda daripada langsung mengurus penanaman hasil bumi, seperti yang dilakukan di Jawa. Di daerah-daerah reaksi terhadap usaha ekspansi kekuasaan Belanda seringkali muncul. Berhubung terjadinya ekspansi tersebut tidak sama untuk masing-masing daerah, maka timbulnya reaksi baik berupa perlawanan-perlawanan bersenjata ataupun gerakan-gerakan sosial tidak bersamaan pula waktunya.

Mengenai penentangan fihak bumiputera terhadap Belanda ini kecuali proses perkembangannya, juga diuraikan strukturnya, seperti: kepemimpinan, golongan pengikut, sistim perbentengan, persenjataan dan taktik perlawanan. Dalam uraian tentang

gerakan sosial juga dikemukakan tipe-tipe dari gerakan, seperti : gerakan melawan pemerasan, gerakan Ratu Adil dan lainnya. Dalam hubungan dengan penentangan terhadap kolonialisme sudah barang tentu tidak semua yang terjadi di tanah air kita dapat tercakup dalam uraian. Pemilihan sebagai contoh dari beberapa kejadian tersebut terpaksa dilakukan, meskipun perlu di sini ditandaskan bahwa baik perlawanan besar atau pun gerakan sosial, kapan dan di mana pun terjadinya, mempunyai nilai yang sama dalam turut berusaha menentang setiap usaha kolonialisme asing.

Perlu pula diakui, bahwa sebagian besar sumber yang digunakan dalam tulisan-tulisan ini adalah sumber sekunder, meskipun disana sini juga digunakan sumber primer. Kemungkinan tidak adanya keseimbangan dalam penggunaan sumber lokal tertulis, disebabkan antara lain oleh terbatasnya kemampuan untuk memperoleh atau menggunakan sumber-sumber tersebut. Dalam batas tertentu diharapkan, bahwa tulisan-tulisan dalam penerbitan ini dapat memberikan gambaran yang agak bulat mengenai sejarah Indonesia dalam abad ke XVIII dan XIX, baik yang menyangkut segi perkembangannya maupun strukturnya.

Yogyakarta, akhir 1974

F.A. SUTJIPTO

**BAB-I SISTIM POLITIK DAN STRUKTUR MASYARAKAT
KERAJAAN—KERAJAAN TRADISIONIL**

A. KERAJAAN MATARAM

1.	<i>Sistim Pembagian Wilayah</i>	1
2.	<i>Susunan Birokrasi Kerajaan</i>	3
3.	<i>Kedudukan dan Kekuasaan Raja</i>	14
4.	<i>Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah</i>	19
5.	<i>Susunan Masyarakat Kerajaan</i>	23

B. KERAJAAN BANJAR

1.	<i>Struktur Pemerintahan</i>	24
2.	<i>Kedudukan Raja dan Sistim Penggantian</i>	28
3.	<i>Simbul Status dan Kehidupan Golongan Bangsawan</i>	30
4.	<i>Penghasilan Kerajaan</i>	33

C. KERAJAAN ACEH

1.	<i>Struktur Pemerintahan</i>	34
2.	<i>Kedudukan Raja dan Para Pejabat Kerajaan</i>	36
3.	<i>Sistim Penggantian Tahta</i>	38
4.	<i>Penghasilan Kerajaan</i>	39

D. KERAJAAN BALI

1.	<i>Wilayah Kerajaan</i>	40
2.	<i>Kedudukan Raja dan Para pejabat Kerajaan</i>	41
3.	<i>Sistim Penggantian Tahta</i>	42
4.	<i>Sistim Pemerintahan dan Birokrasi Kerajaan</i>	43
5.	<i>Kekuasaan Raja dan Penghasilan Kerajaan</i>	46
6.	<i>Susunan Masyarakat Kerajaan</i>	49
7.	<i>Kedudukan dan Kehidupan Masing-masing Golongan dalam Masyarakat</i>	52

**BAB II. PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA
DALAM ABAD KE XIX**

A. SISTIM SEWA TANAH (1811 – 1830)

1.	<i>Pendahuluan</i>	57
2.	<i>Sistim Sewa Tanah</i>	58
3.	<i>Pelaksanaan Sistim Sewa Tanah</i>	59
4.	<i>Sewa (Pajak) Tanah</i>	62
5.	<i>Penanaman Tanaman-tanaman Perdagangan untuk Ekspor</i>	63
6.	<i>Kesimpulan</i>	64

B. SISTIM TANAM PAKSA (CULTUURSTELSEL)

1	<i>Pendahuluan</i>	66
2	<i>Latar Belakang dari Sistim Tanam Paksa</i>	67
3	<i>Ketentuan-ketentuan Pokok dari Sistim Tanam Paksa</i>	68
4	<i>Pelaksanaan Sistim Tanam Paksa</i>	69
5	<i>Persetujuan-persetujuan dengan Rakyat</i>	70
6	<i>Penyerahan Sepersekian dari Tanah Rakyat</i>	71
7	<i>Pekerjaan untuk Penanaman Paksa Tidak Boleh Melebihi Pekerjaan Penanaman Padi</i>	74
8	<i>Pembebasan dari Pajak Tanah</i>	74
9	<i>Penyerahan Selisih Positif antara Nilai Tanaman- tanaman Ekspor dan Pajak Tanah kepada rakyat</i>	75
10	<i>Kerugian-kerugian yang Diderita Akibat Kegagalan Panen ditanggung Pemerintah</i>	76
11	<i>Luasnya Penanaman Paksa</i>	
12	<i>Pembagian Luas Tanah untuk Penanaman Paksa menurut Jenis Tanaman dalam Tahun 1833</i>	77
13	<i>Tanaman-tanaman Musiman dan Tahunan</i>	78
14	<i>Kenaikan Produksi Pertanian</i>	80
15	<i>Perkembangan-perkembangan setelah Tahun 1850</i>	83
16	<i>Keuntungan-keuntungan yang Diperoleh dari Sistim Tanam Paksa</i>	86
17	<i>Penilaian mengenai Sistim Tanam Paksa</i>	88

C. ZAMAN LIBERALISME

1.	<i>Pendahuluan</i>	89
2.	<i>Azas-azas Liberalisme</i>	93
3.	<i>Perkembangan Ekonomi selama Zaman Liberalisme</i>	96
4.	<i>Keadaan Ekonomi Penduduk Indonesia</i>	100
5.	<i>Pembangunan Prasarana</i>	105
6.	<i>Ekspansi Belanda ke Daerah-daerah Luar Jawa</i>	109
7.	<i>Perkembangan Daerah Perkebunan di Sumatera Timur</i>	111
8.	<i>Krisis Tembakau dari Tahun 1891</i>	114
9.	<i>Perkembangan Perkebunan-perkebunan Karet</i>	116
10.	<i>Masalah Tenaga Kerja</i>	
11.	<i>Perkembangan Ekonomi Daerah Sumatera Timur Suatu Ikhtisar.</i>	121

BAB III. PERLAWANAN—PERLAWANAN TERHADAP KOLONIALISME BELANDA DALAM ABAD KEXIX

A. PROSES PERLAWANAN.

1.	<i>Pendahuluan.</i>	123
2.	<i>Perlawanan Thomas Matulesi (1817).</i>	126
3.	<i>Perlawanan Kaum Padri (1821 – 1837).</i>	140
4.	<i>Perlawanan Diponegoro (1825 – 1830).</i>	155
5.	<i>Perlawanan di Sulawesi Selatan (sampai ± 1825).</i>	170
6.	<i>Perlawanan di Kalimantan Selatan (1859 – 1905).</i>	179
7.	<i>Perlawanan di Bali (1846 – 1849)</i>	189
8.	<i>Perlawanan di Aceh (1873 – 1904)</i>	201

B. STRUKTUR PERLAWANAN.

1.	<i>Pimpinan dan Pengikut.</i>	214
2.	<i>Sistim perbentengan.</i>	227
3.	<i>Peralatan dan taktik.</i>	235

BAB IV. GERAKAN SOSIAL.

A.	PENDAHULUAN.	239
B.	GERAKAN MELAWAN PEMERASAN.	242
C.	GERAKAN RATU ADIL.	267
D.	GERAKAN-GERAKAN SEKTE KEAGAMAAN	284
E.	GERAKAN-GERAKAN SAREKAT ISLAM DI DAERAH PEDESAAN.	307

BAB I

SISTIM POLITIK DAN STRUKTUR MASYARAKAT KERAJAAN—KERAJAAN TRADISIONIL

A. KERAJAAN MATARAM—ISLAM DALAM ABAD KE 17 SAMPAI DENGAN 19

Kerajaan Mataram—Islam, yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada tahun 1575, mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung, raja ketiga, memerintah pada tahun 1613 sampai dengan 1645. Pada waktu itu wilayah kekuasaan kerajaan meliputi Jawa—Tengah, Jawa Timur dan sebagian dari Jawa Barat. Namun dalam masa pemerintahan raja-raja yang menggantikannya nampak adanya kemunduran. Berangsur-angsur wilayah kekuasaan kerajaan makin menyempit akibat anexasi yang dilakukan oleh Belanda, sebagai imbalan intervensi Belanda dalam pertentangan-pertentangan intern dalam kerajaan. Setelah Perang Trunojoyo berakhir pada tahun 1678, Mataram harus melepaskan daerah Krawang, sebagian dari daerah Priangan dan Semarang, demikian pula setelah perlawanan Untung Surapati dapat dipadamkan sekitar tahun 1705, daerah Cirebon yang juga mengakui kekuasaan Mataram, juga sisa dari daerah Priangan dan separoh bagian timur pulau Madura dianexasi oleh Belanda. Lebih lanjut setelah Perang—Cina berakhir pada tahun 1743, seluruh daerah pantai utara Jawa dan seluruh pulau Madura sudah dikuasai Belanda. Wilayah kerajaan makin menyempit setelah dengan berakhirnya Perang Giyanti pada tahun 1755, kerajaan Mataram dipecah menjadi dua bagian, ialah kerajaan Surakarta dan kerajaan Yogyakarta. Dalam tahun 1757 dan 1813 wilayah terpecah lagi dengan munculnya kekuasaan-kekuasaan Mangkunegara dan Pakualam.

1. *Sistim Pembagian Wilayah*

Sebelum Belanda VOC menganexasi wilayah-wilayah kerajaan Mataram sejak akhir abad ke 17, seluruh wilayah kekuasaan kerajaan Mataram dibagi menjadi beberapa kesatuan wilayah

besar yang konsentris dengan kraton sebagai pusatnya. Urutan pembagian wilayah dari pusat ke daerah adalah sebagai berikut : Istana atau kraton raja merupakan pusat kerajaan dan terletak di ibukota kerajaan, yang biasa disebut wilayah *Kutanegara* atau sering disingkat *Kutagara*. Selanjutnya wilayah yang mengitari Kutagara ini disebut wilayah *Negara Agung*. Menurut *Serat Pustaka Raja Puwara* wilayah Negara Agung ini semula dibagi menjadi empat bagian, yang meliputi daerah-daerah Kedu, Siti Ageng atau Bumi Gede, Bagelen, dan Pajang. Pada jaman Sultan Agung masing-masing daerah tersebut dibagi lagi menjadi dua bagian. Daerah Kedu dibagi menjadi daerah Siti Bumi dan Bumijo, masing-masing terletak di sebelah barat dan di sebelah timur sungai Progo, daerah Siti Ageng yang terletak di antara Pajang dan Demak dibagi menjadi daerah Siti Ageng Kiwa dan Siti Ageng Tengen; daerah Bagelen dibagi menjadi daerah Sewu, terletak di antara sungai Bogowonto dan Sungai Donan di Cilacap, dan daerah Numbak Anyar yang terletak di antara sungai Bogowonto dan sungai Progo; adapun daerah Pajang juga dibagi menjadi dua bagian, yalah daerah Panumping, meliputi daerah Sukowati, dan daerah Panekar, yalah daerah Pajang sendiri.

Wilayah yang berada di luar Negara Agung, tetapi tidak termasuk daerah pantai, disebut wilayah *Mancanegara*. Karena wilayah ini meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur maka dibagi dalam dua bagian, yalah *Mancanegara Wetan* untuk yang sebelah timur, sedang yang sebelah barat disebut *Mancanegara Kilen*.¹ Wilayah kerajaan yang terletak di sepanjang pantai utara disebut wilayah *Pasisiran*. Sebagaimana halnya wilayah Mancanegara, wilayah Pasisiran juga dibagi menjadi dua bagian, yalah daerah *Pasisiran Wetan* dan *Pasisiran Kilen*.² Batas antara kedua daerah ini adalah sungai Tedunan atau sungai Serang yang mengalir di antara Demak dan Jepara³.

1 Perincian baik dari daerah *Negara Agung* maupun dari *Mancanegara* dapat dibaca pada *Serat Pustoko Rodjo Puworo*, dalam J.Brandes, "Register op de proza-omzetting van de Babad Tanah Djawi (uitgave van 1874)", dalam *VBG*, LI, bagian Empat, 1900 (lampiran II), 151-152, 164-168, 181-182. Juga periksa B.Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, II, (*Ruler and Realm in Early Java*), 's Gravenhabe, 1959, 179-185.

2 Perincian daerah *Pasisiran* terdapat dalam *Serat Poestoko Rodjo Poeworo*, dalam *ibid*, 164-168.

3 B.Schrieke, *Op.Cit.*, 203.

Penggunaan batas alam seperti sungai, gunung, hutan dan lainnnya untuk memisahkan antara kesatuan-kesatuan wilayah adalah lazim pada waktu itu. Bahkan untuk kesatuan wilayah desa, pohon besar yang dapat terlihat dari jauh seperti pohon kapas hutan (*randu alas*) banyak digunakan sebagai batas. Untuk mengurus wilayah yang luas tersebut disusunlah jabatan-jabatan pemerintahan, yang secara hierarkis menyilang dari atas ke bawah dan menyebar dari pusat ke daerah. Dalam hubungan ini raja memegang kekuasaan sentral dan berkedudukan di atas pejabat-pejabat birokrasi tersebut.

2. *Susunan Birokrasi Kerajaan*

Dengan melihat kedudukan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, terpisah dari pejabat-pejabat birokrasi di bawahnya, di sini berturut-turut akan dikemukakan hierarki jabatan-jabatan dengan mengikuti sistim pembagian wilayah seperti tersebut di atas. Dalam pemerintahan kerajaan perlu dibedakan antara pemerintahan dalam istana (*pepintahan lebet*) dan pemerintahan luar istana (*pepintahan jawi*).

Untuk pemerintahan dalam istana pengurusannya dibebankan pada empat orang Wedana Dalam (*Wedana Lebet*), ialah *Wedana Gedong Kiwa*, *Wedana Gedong Tengen*, *Wedana Keparak Kiwa*, dan *Wedana Keparak Tengen*. Di atas keempat jabatan Wedana ini sebelum tahun 1744 ada jabatan Patih Dalam (*Patih Lebet*) yang bertugas mengkoordinasi tugas Wedana-wedana tersebut. Pada masa pemerintahan Sultan Agung pernah Adipati Mandaraka menjabat sebagai *Patih Lebet*, sedang pada masa pemerintahan Amangkurat I pernah Tumenggung Singaranu diangkat menjadi *Patih Lebet*.⁴ Sejak tahun 1755 jabatan Patih Lebet tersebut dihapuskan.⁵ Para Wedana Gedong ditugaskan untuk mengurus keuangan dan perbendaharaan istana, sedang para Wedana Keparak bertugas mengurus keprajuritan dan pengadilan. Pembagian tugas antara *kiwa* dan *tengen* dari kawedanan-kawedanan tersebut adalah kurang jelas. Para Wedana

⁴ *Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daerter plaetse als over geheel Nederlandts India*, 31 jilid, Batavia dan Den Haag, 1888-1931. Untuk selanjutnya disingkat *Dagh Register*. Untuk fakta tersebut periksa *Dagh Register* tahun 1656-1657,34.

⁵ G. P. Rouffaer, "Vorstenlanden", *Adatrechtbundel*, XXXIV, 1931, 279

Lebet ini biasanya memakai gelar *Tumenggung* atau *Pangeran*, bila pejabat tersebut masih keturunan raja. Masing-masing *Wedana* Lebet tersebut dibantu oleh seorang *Kliwon*.⁶ sering juga disebut *Papatih* atau *Lurah Carik* yang biasanya memakai gelar *Ngabehi*; kemudian seorang *Kebayar*, yang memakai gelar *Ngabehi*, *Rangga* atau *Raden*, dan 40 orang *Mantri Jajar*

Untuk mengurus pemerintahan di Kutagara raja mengangkat 2 orang *Tumenggung*. Kedua *Tumenggung* ini langsung di bawah perintah raja. Rouffaer menyebut jabatan ini sebagai *Administrateur van het kroondomein* (Yang mengurus tanah milik raja).⁷ Kedudukan kedua *Tumenggung* Kutagara ini cukup penting dan bersama-sama dengan keempat *Wedana* Lebet mereka merupakan anggota Dewan Tertinggi Kerajaan. Pada jaman Kartasura sekitar tahun 1744 pengurusan daerah Kutagara ditugaskan pada 4 orang pejabat, seorang di antaranya diangkat menjadi kepala (*Wedana*) mereka.

Wilayah *Negara Agung* masih termasuk daerah pusat kerajaan. Sudah disebut di muka bahwa wilayah ini dipecah menjadi 8 bagian. Tiap-tiap daerah bagian ini dikepalai oleh seorang *Wedana Luar (Wedana Jawi)*. Sesuai dengan nama daerah-daerah bagian tersebut, maka terdapat sebutan *Wedana Bumi*, *Wedana Bumija*, *Wedana Sewu*, *Wedana Nurabak Anyar*, *Wedana Siti Ageng Kiwa*, *Wedana Siti Ageng Tengen*, *Wedana Panumping* dan *Wedana Panekar*. Umumnya *Wedana-wedana Negara Agung* ini mempunyai tempat kediaman di *Kutagara*. Seperti halnya *Wedana-wedana Lebet*, *Wedana-wedana Jawi* ini masing-masing juga dibantu oleh seorang *Kliwon*, seorang *Kebayan* dan 40 orang *Mantri Jajar*.⁸ Sebagai koordinator para *Wedana* ini adalah seorang *Patih Jawi*, yang tugasnya tidak hanya menyangkut wilayah *Negara Agung*, tetapi juga wilayah-wilayah kerajaan yang ada di luarnya. Tanah-tanah *lungguh* ini bangsawan yang bersang-

⁶ *Kliwon* menurut Rouffaer berasal dari kata *lu veet*=banyak. *Kliwon Hoofd over Velen* (periksa *ibid.* 291-292)
Serat Wadu Aji menyebutkan "... *Kliwon tegesipun kapiji, dene winenang anampeni parentah saking Bupati, utawi tegesipun malih kalih ewon punika kabekta saking lenggahipun kala ing kina siti dusun kawa kalih ewu* periksa *Serat Wadu Aji* dalam lampiran IV tulisan J.Brandes. *Op Cit* 192

⁷ G.P.Rouffaer, *Op.Cit* 283

⁸ *Serat Pustaka Raja Puwara*, dalam J.Brandes, *Op.Cit* 156-159